

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setana Press : Bandung.
- Marzuki, Mahmud . 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2013. *Pertumbuhan&Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga : Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wundown, Cheeny Engglin. 2015. "*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan*" Skripsi, Universitas Sam Ratu Langi. Manado.
- Yasin, Muhammad. 2015 "*Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" PT PATRRIO : Jakarta.

Jurnal :

- Wijanto, Dodi Eko. 2014, "*Hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*". Jurnal Independt, Fakultas Hukum. Vol. 2, No.1

Skripsi :

Sabrina, Hindun. 2005. *“Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa”* Skripsi, Universitas Jember, Jember.

Saputra, Prayoga. 2014. *“Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”* Skripsi, UIN Syarif Hadituollah, Jakarta.

Undang-undang :

Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Pemendagri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Perbub Magetan Nomor 12 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah